

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah isu kesehatan masyarakat yang sangat serius, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), stunting didefinisikan sebagai kondisi di mana tinggi badan anak berada di bawah standar yang telah ditentukan sesuai dengan usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama dan infeksi yang terjadi berulang kali. Di Indonesia, prevalensi stunting pada tahun 2021 tercatat mencapai 24,4%, yang berarti hampir satu dari empat anak mengalami masalah pertumbuhan yang serius ini (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Angka yang cukup tinggi ini menunjukkan betapa pentingnya adanya intervensi yang kuat dan terfokus, terutama dari pemerintah desa, yang memiliki peran yang sangat krusial dalam menangani permasalahan ini di tingkat lokal.

Stunting merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya gangguan pada pertumbuhan anak, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang seharusnya sesuai dengan usia anak tersebut. Masalah ini mencerminkan tantangan kesehatan masyarakat yang serius, karena dampak dari stunting sangat luas, tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif anak. Permasalahan gizi yang buruk menjadi tantangan bagi seluruh negara, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat dirasakan dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, masalah ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan daya saing, peningkatan angka kemiskinan, serta bertambahnya jumlah pengangguran.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah kunci untuk kemajuan suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari status gizi yang baik pada balita, yang dapat diukur dari seberapa banyak dan seimbang makanan yang mereka konsumsi. Jika terdapat masalah terkait dengan gizi buruk, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pola makan anak, pola asuh yang kurang tepat, kurangnya ketersediaan makanan bergizi, serta faktor ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, mengentaskan kelaparan, dan menghilangkan berbagai bentuk malnutrisi, serta mencapai Zero Hunger. (Haskas et al., 2020)

Pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengimplementasikan berbagai program kesehatan dan gizi, karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh warganya. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting. Melalui berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan, pemerintah desa dapat memberikan akses kepada layanan kesehatan, pendidikan gizi, serta dukungan sosial bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting. Sebagai contoh, program Posyandu (Pos Pelayanan

Terpadu) yang diinisiasi oleh pemerintah desa telah terbukti efektif dalam memantau pertumbuhan anak dan memberikan edukasi mengenai gizi. (Dela Pusfita et al., 2024)

Namun, pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menurunkan angka stunting. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya dan pendanaan yang memadai. Banyak desa yang masih bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat atau provinsi, sehingga program-program yang dilaksanakan sering kali tidak berkelanjutan. Kalpin Sembiring (2021) mengemukakan bahwa desa yang memiliki dana desa yang cukup dapat lebih efektif dalam melaksanakan program-program kesehatan dan gizi. Misalnya, penyuluhan kepada ibu hamil dan menyusui, serta pemberian makanan tambahan untuk anak-anak, dapat dilakukan secara lebih intensif jika ada alokasi dana yang memadai. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik serta alokasi anggaran yang tepat sangat berpengaruh terhadap efektivitas intervensi yang dilakukan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan sektor swasta, juga merupakan aspek yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kerjasama ini dapat memperkuat program-program yang ada dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, program kemitraan antara pemerintah desa dan NGO yang berfokus pada isu gizi dapat membantu dalam penyuluhan dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Juander Sebayang (2022) menyatakan bahwa

kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting, karena masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak mereka. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah desa dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya menanggulangi stunting.

Penanganan dan pencegahan stunting merupakan penerapan dari undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman dalam menangani masalah stunting. Dalam pedoman tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian stunting secara nasional. Pedoman ini mencakup antara lain Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Inisiatif Gizi dan Stunting, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya. (Purnamasari, 2021)

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa. Salah satu implikasi dari UU Desa adalah sejak tahun 2015, dana desa telah disalurkan. Dana tersebut digunakan sebagai prioritas dalam penggunaan anggaran, di mana salah satu prioritasnya adalah bidang kesehatan, khususnya perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam menurunkan angka stunting.

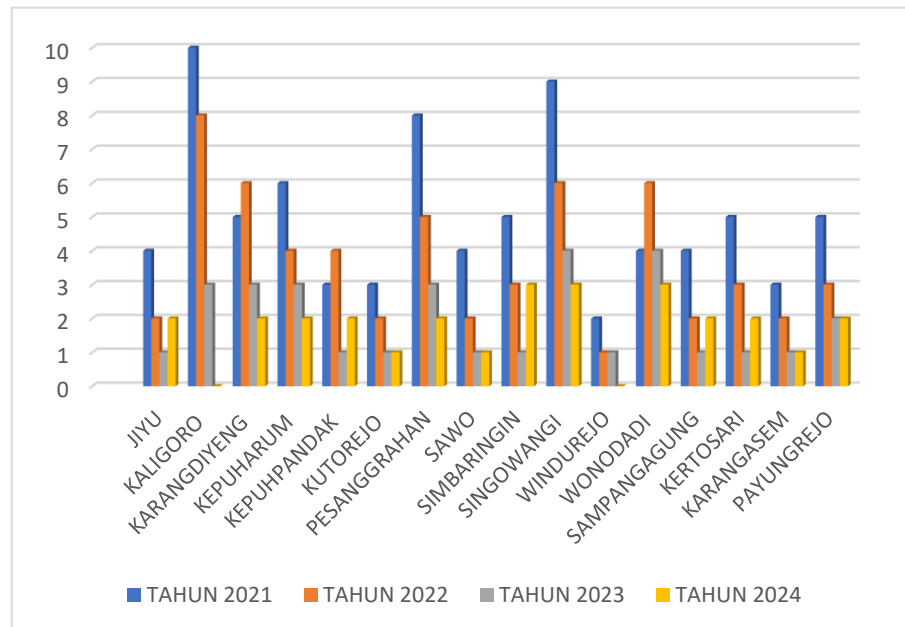
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dr Ulum Rokhmat Rokhmawan menjelaskan, angka stunting di wilayahnya mencapai 27,4% pada tahun 2021 berdasarkan Survei Status Stunting Indonesia (SSGI). Pada

tahun 2022, angka stunting dan gizi buruk pada anak dibawah 5 tahun akan menurun menjadi 11,6%. Sedangkan berdasarkan data Registrasi dan Pelaporan Gizi Masyarakat Secara Elektronik (EPPGBM) per Agustus 2022, jumlah balita stunting di Kabupaten Mojokerto sebanyak 2.132 anak atau setara dengan 4.000 anak terukur. Balita berjumlah 2.248 orang dan balita kurus sebanyak 2.137 orang. Jumlah anak yang diukur saat itu sebanyak 44.324 dari total sasaran 79.773 anak. Pada tahun 2023, persentase balita stunting di Kabupaten Mojokerto mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,01% dari berat badan anak. Sebab, jumlah anak stunting saat ini sebanyak 2.219 orang. Sedangkan jumlah bayi yang ditimbang sebanyak 44.257 bayi atau mencapai 53,59% dari target berat badan sebanyak 82.591 bayi. Sebanyak 2.849 anak mengalami gizi buruk atau 6,44% dan 2.895 anak mengalami gizi buruk atau 6,54%. Ribuan anak stunting tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto (Cici Ariyanti et al., 2024). Pada akhir tahun 2024 prosentase mengalami penurunan, tercatat 2,05% atau setara 1.339 balita dari 65.225 balita.

Kecamatan Kutorejo merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Kutorejo juga tidak terlepas dari adanya permasalahan stunting. Dalam wilayah Kecamatan Kutorejo menaungi 2 puskesmas yang terlibat dalam penanganan stunting.

Kecamatan ini terdiri dari 17 Desa yang sebagian dari desa tersebut balitanya mengalami stunting yang bisa digambarkan pada diagram berikut ini :

Grafik 1.1 Data balita stunting di Kecamatan Kutorejo Tahun 2023-2024



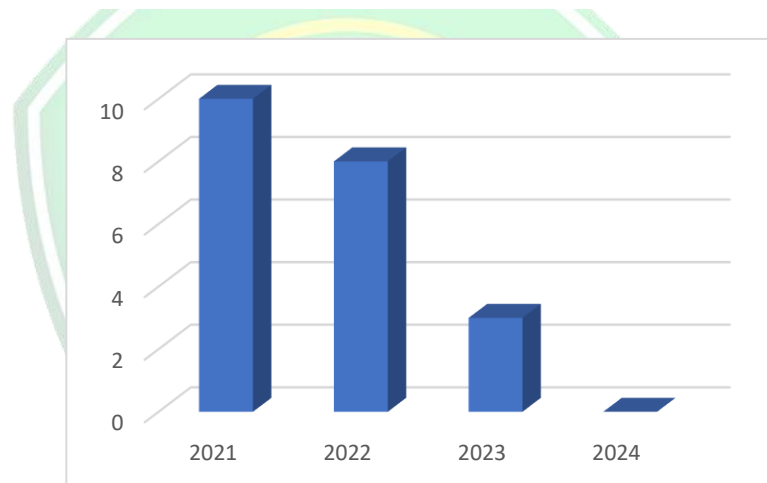
Sumber : Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Kutorejo

Adapun upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka stunting, mulai dari membuat regulasi seperti Peraturan Bupati Mojokerto nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/160/HK/416-012/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/5/KEP/416-000/2022 tentang TPPS Tingkat kecamatan.

Desa Kaligoro, yang terletak di Kecamatan Kutorejo, juga tidak terlepas dari permasalahan stunting pada balita. Kondisi ini menjadi

tantangan berat bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya stunting sangat berkaitan dengan status gizi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada balita melalui program-program yang relevan dengan kondisi masyarakat. Kasus stunting pada balita di Desa Kaligoro ini tidak terlepas dari rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi balita yang ada. Hal ini bisa dilihat dari diagram dibawah ini :

**Grafik 1.2 Data balita stunting di Desa Kaligoro
Kecamatan Kutorejo Tahun 2021-2024**



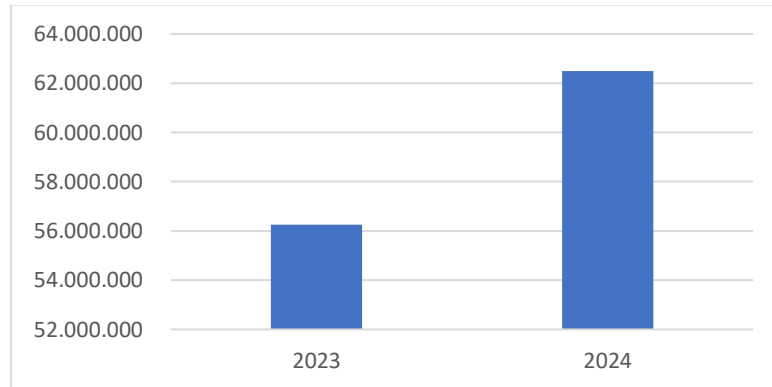
Sumber : Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Kutorejo

Berdasarkan diagram di atas ini menunjukkan adanya penurunan angka stunting di Desa Kaligoro, dimana pada tahun 2023 angka balita stunting menunjukkan 3 balita. Dan ditahun 2024 terjadi penurunan yaitu 0 balita.

Selama ini, pemerintah Desa Kaligoro telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mencegah dan menangani stunting di wilayahnya. Besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Desa

Kaligoro dapat dilihat dari data yang ada, dan ini menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah desa dalam menangani masalah stunting secara serius dan berkelanjutan.

Grafik 1.3 Alokasi anggaran stunting di Desa Kaligoro Tahun 2023-2024



Sumber : Pemerintah Desa Kaligoro

Anggaran APBDes Desa Kaligoro terutama ditujukan untuk kegiatan yang mendukung program penurunan kejadian stunting pada balita seperti perbaikan gizi (PMT) bagi ibu hamil, menyusui dan balita melalui posyandu, kegiatan sosialisasi baik itu rembug stunting atau peningkatan kapasitas kader kesehatan, kelas ibu hamil dan balita, penyediaan sarana prasarana kesehatan di posyandu, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan penurunan stunting di Desa Kaligoro.

Semakin besar anggaran APBDes, kejadian stunting pada balita semakin menurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Kaligoro dalam menurunkan kejadian stunting.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka terumuslah fokus penelitian sebagai berikut.

Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Menurunkan Stunting di Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Kaligoro dalam menurunkan stunting.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang peran pemerintah desa dalam menurunkan stunting.

b) Manfaat praktis

1) Bagi Pemerintah Desa Kaligoro

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk membuat kebijakan menurunkan angka stunting di Desa Kaligoro.

2) Bagi masyarakat Desa Kaligoro

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Kaligoro tentang pentingnya menurunkan angka stunting

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi kepada orang tua yang balitanya mengalami stunting untuk terus merawat bayinya dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

